**LAMPIRAN I**

**PERATURAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 6 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN PERMOHONAN PEMOHON, JAWABAN TERMOHON, KETERANGAN PIHAK TERKAIT, DAN KETERANGAN BAWASLU DALAM PENYELESAIAN PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH, SERTA PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN**

**PEDOMAN PENYUSUNAN KETERANGAN PIHAK TERKAIT**

**PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR DAN DPRD**

**SISTEMATIKA KETERANGAN PIHAK TERKAIT**

**IDENTITAS PIHAK TERKAIT**

1. **DALAM EKSEPSI (jika diperlukan dan bersifat alternatif)**
   1. **KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

*Tanggapan/sanggahan Pihak Terkait terhadap dalil Pemohon yang menjelaskan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan hasil pemilihan umum anggota DPR dan DPRD.*

* 1. **KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON**

*Tanggapan/sanggahan Pihak Terkait terhadap dalil Pemohon yang menjelaskan Pemohon adalah:*

1. *Partai Politik peserta pemilihan umum dan nomor urut berdasarkan Keputusan Termohon; dan/atau*
2. *Calon anggota DPR dan DPRD dan nomor urut berdasarkan Keputusan Termohon.*
   1. **TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN**

*Tanggapan/sanggahan Pihak Terkait terhadap dalil Pemohon yang menjelaskan tenggang waktu pengajuan permohonan sesuai dengan ketentuan Pasal 474 ayat (2) UU 7/2017 juncto Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018,* *yaitu diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam* *sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional.*

*(Selain eksepsi tersebut di atas Pihak Terkait dapat mengajukan eksepsi lain, misalnya terkait dengan Permohonan Pemohon kabur atau surat kuasa).*

1. **DALAM POKOK PERMOHONAN**

**PROVINSI...**

1. **PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) MENURUT PIHAK TERKAIT DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR, DPRD PROVINSI, DAN DPRD KABUPATEN/KOTA.**

*Pihak Terkait menyandingkan dan menjelaskan perbedaan perolehan suara menurut Pihak Terkait dan Pemohon disertai kontra alat bukti terkait dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon (Partai Politik) hanya pada DAPIL yang dimohonkan secara lengkap dalam tabel.*

1. **PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON (CALON ANGGOTA DPR/DPRD) MENURUT PIHAK TERKAIT DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR, DPRD PROVINSI, DAN DPRD KABUPATEN/KOTA.**

*Pihak Terkait menyandingkan dan menjelaskan perbedaan perolehan suara menurut Pihak Terkait dan Pemohon disertai kontra alat bukti terkait dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon (Calon Anggota DPR/DPRD) hanya pada DAPIL yang dimohonkan secara lengkap dalam tabel.*

1. **PETITUM**

*Dalam Eksepsi*

*Menerima eksepsi Pihak Terkait;*

*Dalam Pokok Permohonan*

* + - 1. *Menyatakan Permohonan Pemohon ditolak atau tidak dapat diterima;*
      2. *Menyatakan Keputusan KPU tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD telah benar;*
      3. *Menetapkan perolehan suara yang benar untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota;*

*- Kop surat logo partai politik peserta pemilu -*

Jakarta, ....... Mei 2019

Hal : Keterangan Pihak Terkait terhadap Perkara Nomor ...-... /PHPU-DPR-DPRD/XVII/2019 yang dimohonkan oleh Pemohon (Partai Poltik... */calon peserta pemilu anggota DPR dan DPRD*)

**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi**

**Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6**

**Jakarta Pusat**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : ..............................................................................

Jabatan : Ketua Umum/Presiden *(sesuai dengan nomenklatur jabatan yang digunakan oleh partai politik peserta Pemilu)* Partai ..................................

Alamat Kantor : ..............................................................................

..............................................................................

nomor telepon/HP..............................................

email ..................................................................

NIK : ........................................................... *(sesuai KTP)*

2. Nama : ..............................................................................

Jabatan : Sekretaris Umum/Sekretaris Jenderal *(sesuai dengan nomenklatur jabatan yang digunakan oleh partai politik peserta Pemilu)* Partai ........................

Alamat Kantor : ..............................................................................

..............................................................................

nomor telepon/HP..............................................

email ..................................................................

NIK : ........................................................... *(sesuai KTP)*

bertindak untuk dan atas nama Partai... dan calon anggota DPR, DPRD Provinsi/DPRA, DPRD Kabupaten/Kota/DPRK:

1) ...,

2) ...,

3) dst.

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor..., tanggal..., memberi kuasa kepada:

1) ...,

2) ...,

3) *dst.*

kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor... yang beralamat di... nomor telepon/HP... *email*: ... NIK/Kartu advokat..., baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa:

Selanjutnya disebut sebagai........................................................**Pihak Terkait;**

Dalam hal ini memberikan Keterangan Pihak Terkait terhadap Perkara Nomor ...-... /PHPU-DPR-DPRD/XVII/2019 yang dimohonkan oleh Pemohon (Partai... *nama partai politik peserta pemilu*), sebagai berikut:

1. **DALAM EKSEPSI (jika diperlukan dan bersifat alternatif)**

1. **KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

Menurut Pihak Terkait Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara PHPU anggota DPR dan DPRD dalam Pemilu Tahun 2019 yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. bahwa...,
2. bahwa...,
3. *dst.*
4. **KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON**

Menurut Pihak Terkait, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan PHPU anggota DPR dan DPRD dalam Pemilu Tahun 2019 sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. bahwa...,
2. bahwa...,
3. *dst*.
4. **TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN**
5. Bahwa penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional dalam Pemilu Tahun 2019 diumumkan oleh Termohon pada tanggal..., pukul..., Dengan demikian, tenggang waktu 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam untuk mengajukan permohonan adalah pada tanggal..., pukul..., sampai dengan tanggal..., pukul...,
6. Bahwa Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal..., pukul...,
7. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pihak Terkait, Permohonan Pemohon diajukan melewati tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.
8. **PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS *(OBSCUUR LIBEL)***

Menurut Pihak Terkait, Permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. bahwa...,
2. bahwa...,
3. *dst*.
4. ***Eksepsi lainnya (jika ada).***
5. **DALAM POKOK PERMOHONAN**

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara, perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota di beberapa Daerah Pemilihan, menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut:

* 1. **PROVINSI...**
     1. **PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR**

*Pihak Terkait menyandingkan dan menjelaskan selisih perolehan suara disertai kontra alat bukti terkait dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon (Partai Politik) hanya pada DAPIL yang dimohonkan dalam tabel sebagai berikut:*

**2.1.1.1. DAPIL...**

**Tabel ... PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT PIHAK TERKAIT DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **PARPOL** | **Perolehan Suara** | | **Selisih** |
| **Pihak Terkait** | **Pemohon** |
| 1. | ... | ... | ... | ... |
| 2. | ... | ... | ... | ... |
| 3. | *dst.* | ... | ... | ... |

*Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara di atas, menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut:*

* + - 1. *Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di... sebanyak*… *suara adalah tidak benar (bukti PT-…,).*
      2. *Bahwa terjadinya penambahan perolehan suara bagi Parpol lain di... sebanyak... suara adalah tidak benar (bukti PT-…,).*
      3. *dst.*

**2.1.1.2. DAPIL..dst***. [sesuai dengan jumlah permohonan yang dimohonkan oleh Pemohon (Partai Politik)]*

* + 1. **PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPR UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR**

*Pihak Terkait menyandingkan dan menjelaskan selisih perolehan suara disertai kontra alat bukti terkait dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon (Calon anggota DPR) hanya pada DAPIL yang dimohonkan dalam tabel sebagai berikut:*

* + - 1. **DAPIL...**

**Tabel ... PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPR MENURUT PIHAK TERKAIT DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Nama Calon Anggota DPR** | **Perolehan Suara** | | **Selisih** |
| **Pihak Terkait** | **Pemohon** |
| 1. | ... | ... | ... | ... |
| 2. | ... | ... | ... | ... |
| 3. | *dst.* | ... | ... | ... |

*Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara di atas, menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut:*

1. *Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di ... sebanyak... suara adalah tidak benar (bukti PT-…).*
2. *Bahwa terjadinya penambahan perolehan suara bagi calon lain di... sebanyak... suara adalah tidak benar (bukti PT-…).*
3. *dst.*
   * + 1. **DAPIL..., dst***. [sesuai dengan jumlah permohonan yang dimohonkan oleh Pemohon (Calon Anggota DPR)]*
     1. **PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI**

*Pihak Terkait menyandingkan dan menjelaskan selisih perolehan suara disertai kontra alat bukti terkait dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon (Partai Politik) hanya pada DAPIL yang dimohonkan dalam tabel sebagai berikut:*

* + - 1. **DAPIL ...**

**Tabel ... PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT PIHAK TERKAIT DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **PARPOL** | **Perolehan Suara** | | **Selisih** |
| **Pihak Terkait** | **Pemohon** |
| 1. | ... | ... | ... | ... |
| 2. | ... | ... | ... | ... |
| 3. | *dst.* | ... | ... | ... |

*Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara di atas, menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut:*

1. *Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di... sebanyak... suara adalah tidak benar (bukti PT-…).*
2. *Bahwa terjadinya penambahan perolehan suara bagi Parpol lain di... sebanyak... suara adalah tidak benar (bukti PT-…).*
3. *dst.*
   * + 1. **DAPIL..., dst***. [sesuai dengan jumlah permohonan yang dimohonkan oleh Pemohon (Calon Anggota DPR)]*
     1. **PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPRD PROVINSI UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI**

*Pihak Terkait menyandingkan dan menjelaskan selisih perolehan suara disertai kontra alat bukti terkait dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon (Calon Anggota DPRD Provinsi) hanya pada DAPIL yang dimohonkan dalam tabel sebagai berikut:*

**2.2.4.1. DAPIL...**

**Tabel ... PERSANDINGAN PEROLEHAN CALON ANGGOTA DPRD PROVINSI SUARA MENURUT PIHAK TERKAIT DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Nama Calon Anggota DPRD Provinsi** | **Perolehan Suara** | | **Selisih** |
| **Pihak Terkait** | **Pemohon** |
| 1. | ... | ... | ... | ... |
| 2. | ... | ... | ... | ... |
| 3. | *dst.* | ... | ... | ... |

*Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara di atas, menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut:*

1. *Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di... sebanyak... suara adalah tidak benar (bukti PT-…).*
2. *Bahwa terjadinya penambahan perolehan suara bagi calon lain di... sebanyak... suara adalah tidak benar (bukti PT-…).*
3. *dst.*

**2.2.4.2. DAPIL..., *dst*** *[sesuai dengan jumlah permohonan yang dimohonkan oleh Pemohon (Calon Anggota DPRD Provinsi)]*

* + 1. **PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA**

*Pihak Terkait menyandingkan dan menjelaskan selisih perolehan suara disertai kontra alat bukti terkait dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon (Partai Politik) hanya pada DAPIL yang dimohonkan dalam tabel sebagai berikut:*

**2.1.5.1. KABUPATEN/KOTA...**

* + - * 1. **DAPIL...**

**Tabel ... PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT PIHAK TERKAIT DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **PARPOL** | **Perolehan Suara** | | **Selisih** |
| **Pihak Terkait** | **Pemohon** |
| 1. | ... | ... | ... | ... |
| 2. | ... | ... | ... | ... |
| 3. | *dst.* | ... | ... | ... |

*Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara di atas, menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut:*

1. *Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di... sebanyak... suara adalah tidak benar (bukti PT-…).*
2. *Bahwa terjadinya penambahan perolehan suara bagi Parpol lain di... sebanyak... suara adalah tidak benar (bukti PT-…).*
3. *dst.*
   * + - 1. **DAPIL... *dst*** *[sesuai dengan jumlah permohonan yang dimohonkan oleh Pemohon (Parpol)]*
       1. **KABUPATEN/KOTA...**
          1. **DAPIL...**
          2. **DAPIL...*dst*** *[sesuai dengan jumlah permohonan yang dimohonkan oleh Pemohon (Parpol)]*
     1. **PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA**

*Pihak Terkait menyandingkan dan menjelaskan selisih perolehan suara disertai kontra alat bukti terkait dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon (Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota) hanya pada DAPIL yang dimohonkan dalam tabel sebagai berikut:*

**2.1.6.1. KABUPATEN...**

* + - * 1. **DAPIL...**

**Tabel ... PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPRD MENURUT PIHAK TERKAIT DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota** | **Perolehan Suara** | | **Selisih** |
| **Pihak Terkait** | **Pemohon** |
| 1. | ... | ... | ... | ... |
| 2. | ... | ... | ... | ... |
| 3. | *dst.* | ... | ... | ... |

*Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara di atas, menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut:*

1. *Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di... sebanyak... suara adalah tidak benar (bukti PT-…).*
2. *Bahwa terjadinya penambahan perolehan suara bagi calon lain di... sebanyak... suara adalah tidak benar (bukti PT-…).*
3. *dst.*
   * + - 1. **DAPIL..., *dst*** *[sesuai dengan jumlah permohonan yang dimohonkan oleh Pemohon (Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota)]*
       1. **KABUPATEN/KOTA...** 
          1. **DAPIL...untuk**

**2.1.6.2.2 DAPIL..., *dst*** *[sesuai dengan jumlah permohonan yang dimohonkan oleh Pemohon (Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota)]*

* 1. **PROVINSI..., *dst*.** *[sesuai dengan jumlah permohonan yang dimohonkan oleh Pemohon (Partai Politik dan Calon Anggota DPR dan DPRD)]*

**III. PETITUM**

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Menerima eksepsi Pihak Terkait.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor… tentang ... (Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD Tahun 2019), bertanggal…, Mei 2019:
3. Menetapkan perolehan suara Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota di beberapa daerah pemilihan yang benar adalah sebagai berikut:
4. 1. **PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK/CALON ANGGOTA DPR DAN DPRD) DI PROVINSI...** 
      1. **PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR**

*Pihak Terkait menyampaikan perolehan suara yang benar menurut Pihak Terkait, adalah sebagai berikut ini:*

**DAPIL...**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **No.** | **PARPOL** | **Perolehan Suara** |
| 1. | ... | ... |
| 2. | ... | ... |
| 3. | *dst.* | ... |

**DAPIL..., dst***. [sesuai dengan jumlah permohonan yang dimohonkan oleh Pemohon (Parpol)]*

* + 1. **PEROLEHAN SUARA PEMOHON (CALON ANGGOTA DPR) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR**

*Pihak Terkait menyampaikan perolehan suara yang benar menurut Pihak Terkait, adalah sebagai berikut ini:*

**DAPIL ...**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **No.** | **Nama Calon Anggota DPR** | **Perolehan Suara** |
| 1. | ... | ... |
| 2. | ... | ... |
| 3. | *dst.* | ... |

**DAPIL..., dst***. [sesuai dengan jumlah permohonan yang dimohonkan oleh Pemohon (calon anggota DPR)]*

* + 1. **PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI**

*Pihak Terkait menyampaikan perolehan suara yang benar menurut Pihak Terkait, adalah sebagai berikut ini:*

**DAPIL...**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **No.** | **PARPOL** | **Perolehan Suara** |
| 1. | ... | ... |
| 2. | ... | ... |
| 3. | *dst.* | ... |

**DAPIL..., dst***. [sesuai dengan jumlah permohonan yang dimohonkan oleh Pemohon (Parpol)]*

* + 1. **PEROLEHAN SUARA PEMOHON (CALON ANGGOTA DPRD PROVINSI) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI**

*Pihak Terkait menyampaikan perolehan suara yang benar menurut Pihak Terkait, adalah sebagai berikut ini:*

**DAPIL...**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **No.** | **Nama Calon Anggota DPRD Provinsi** | **Perolehan Suara** |
| 1. | ... | ... |
| 2. | ... | ... |
| 3. | *dst.* | ... |

**DAPIL…, dst***. [sesuai dengan jumlah permohonan yang dimohonkan oleh Pemohon (calon anggota DPRD Provinsi)]*

* + 1. **PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA**

*Pihak Terkait menyampaikan perolehan suara yang benar menurut Pihak Terkait, adalah sebagai berikut ini:*

**KABUPATEN/KOTA...**

**DAPIL...**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **No.** | **PARPOL** | **Perolehan Suara** |
| 1. | ... | ... |
| 2. | ... | ... |
| 3. | *dst.* | ... |

**KABUPATEN/KOTA..., dst** *[sesuai dengan jumlah perolehan suara Pemohon (Partai Politik) di Kabupaten/Kota yang dimohonkan]*

* + 1. **PEROLEHAN SUARA PEMOHON (CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA**

*Pihak Terkait menyampaikan perolehan suara yang benar menurut Pihak Terkait, adalah sebagai berikut ini:*

**KABUPATEN/KOTA…**

**DAPIL...**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **No.** | **Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota** | **Perolehan Suara** |
|
| 1. | ... | ... |
| 2. | ... | ... |
| 3. | *dst.* | ... |

**DAPIL…, dst.** *[sesuai dengan jumlah permohonan yang dimohonkan oleh Pemohon (calon anggota DPRD Kabupaten/Kota)].*

**KABUPATEN/KOTA..., dst.**

**DAPIL..., dst.** *[sesuai dengan jumlah permohonan yang dimohonkan oleh Pemohon (calon anggota DPRD Kabupaten/Kota)].*

* 1. **PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK/CALON ANGGOTA DPR DAN DPRD) DI PROVINSI..., dst.**

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami,  
**Pihak Terkait/Kuasa Hukum Pihak Terkait\***

* + - 1. Nama (tanda tangan)
      2. Nama (tanda tangan)
      3. dst.

\*jika menggunakan kuasa hukum, Keterangan Pihak Terkait ditandatangani oleh kuasa hukum.